

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM MEMBANGUN BUDAYA MUTU DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

(Studi Kasus : Prodi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura)

Oleh :

Ismail¹

NIM. E1012181030

Sri Maryuni², Pardi³

E-mail: is_mail@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SPMI dalam membangun budaya mutu di Universitas Tanjungpura dengan studi kasus di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III yang dapat dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen mutu yang berhubungan dengan implementasi kebijakan SPMI Universitas Tanjungpura dan Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPMI dilihat dari faktor komunikasi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari penyampaian informasi antara jajaran program studi dengan dosen dan tenaga kependidikan. Jumlah auditor AMI dengan program studi di lingkungan Universitas Tanjungpura perbandingannya masih belum ideal. Temuan hasil AMI harus segera ditindak lanjuti sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan dapat berjalan maksimal. Dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI diharapkan para pelaksana kebijakan mulai dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura bisa lebih optimal lagi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Kata kunci:

Implementasi; Budaya Mutu; Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; Struktur Birokrasi.

Abstract

This study is intended to describe and analyze the factors that influence the implementation of SPMI policies in building a culture of quality at Tanjungpura University with a case study in the Master of Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Tanjungpura University. This study uses a qualitative approach with descriptive research and the theory used in this research is Edward III's theory which can be seen from four factors, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In this study, the authors used primary data in the form of interviews and secondary data in the form of quality documents related to the implementation of the SPMI policy at Tanjungpura University and the Master of Management Study Program at Tanjungpura University. The results of this study indicate that the implementation of the SPMI policy in terms of communication factors and bureaucratic structure has not gone well. This can be seen from the delivery of information between the ranks of the study program with lecturers and education staff. The number of AMI auditors with study programs at Tanjungpura University is still not ideal. The findings of the AMI results must be followed up immediately so that continuous quality improvement can run optimally. In implementing the SPMI policy, it is hoped that policy implementers from the Institute for Learning Development and Quality Assurance, the Faculty of Economics and Business and the Master of Management Study Program FEB Tanjungpura University can be even more optimal so that the expected goals can be achieved.

Keywords:

Implementation; Quality Culture; Communication; Resources; Disposition; Bureaucratic Structure.

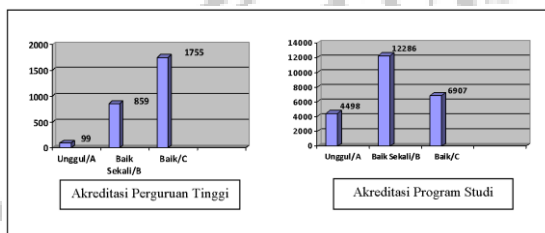
A. Pendahuluan

Pendidikan yang bermutu menjadi suatu kebutuhan dan alasan bagi banyak orang ketika ingin melanjutkan pendidikan selanjutnya. Bahkan berdasarkan kepada kebutuhan mutu yang dicari, tidak jarang banyak orang yang merantau ke daerah lain guna memenuhi keinginannya tersebut. Mutu pendidikan yang rendah akan berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan dari proses pendidikan, sehingga dengan permasalahan ini banyak calon mahasiswa memilih Perguruan Tinggi mana yang akan membantunya untuk meningkatkan kompetensi guna bersaing dalam dunia

kerja nanti. Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Faktanya saat ini mutu pendidikan Perguruan Tinggi masih rendah, kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia terlihat dari hasil akreditasi pada tahun 2020 menurut Intisari Statistik Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa sebanyak 2.713 Perguruan Tinggi terakreditasi yang terdiri dari 95 terakreditasi A dan 4 terakreditasi Unggul, 809 terakreditasi B dan 50 terakreditasi Baik Sekali, serta 1.291

terakreditasi C dan 464 terakreditasi Baik. Sementara itu sebanyak 23.691 Program Studi terakreditasi yang terdiri dari 4.373 terakreditasi A dan 125 terakreditasi Unggul, 12.224 terakreditasi B dan 62 terakreditasi Baik Sekali, serta 5.167 terakreditasi C dan 1.740 terakreditasi Baik.



Sumber: *Intisari Statistik Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020*

Gambar 1.
Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi di Indonesia

Dalam upaya menciptakan budaya mutu di Perguruan Tinggi secara nasional, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada Bab III yang menjelaskan mengenai Penjaminan Mutu yang meliputi: Sistem Penjaminan Mutu, Standar Pendidikan Tinggi, Akreditasi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam UU Dikti pasal 52 ayat (3) menerangkan bahwa Menteri Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, dimana Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Menurut Sulaiman dan Wibowo (2016:28), SPMI merupakan suatu kegiatan internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk melaksanakan setiap proses penjaminan mutu secara mandiri, mulai dari kegiatan penjaminan mutu ditetapkan, diimplementasikan dan dikontrol oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.

Perguruan Tinggi harus melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI. Dari kelima siklus tersebut yang sangat menjadi perhatian bagi Perguruan Tinggi yaitu pada siklus pelaksanaan, karena siklus pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan SPMI untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan (Trianto, 2020: 135).

Tujuan dari penjaminan mutu ini yaitu untuk memelihara dan meningkatkan

mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Perguruan Tinggi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi (Pratama, 2018:1).

Sistem penjaminan mutu pada setiap Perguruan Tinggi dilakukan secara internal dan eksternal. Dimana penjaminan mutu internal dilakukan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri dengan membentuk suatu unit/badan/Lembaga yang diberikan tanggung jawab terhadap penjaminan mutu. Sedangkan penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang telah diakui oleh pemerintah atau oleh lembaga lain yang kredibel.

Menurut teori Model Goerge C. Edward III dimana model Implementasi kebijakan publiknya disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teorinya ini, terdapat empat variabel yang menyebabkan keberhasilan mengenai implemementasi dari suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Implementasi SPMI dengan siklus

PPEPP diharapkan Program Studi dan Perguruan Tinggi dapat selalu meningkatkan standar mutunya dengan melakukan perubahan untuk memperoleh standar mutu yang lebih tinggi dari sebelumnya, alur ini disebut juga dengan *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Berjalannya siklus PPEPP dapat diukur salah satunya dengan hasil evaluasi dari pihak eksternal (visitasi akreditasi dari BAN-PT) yang hasil evaluasi tersebut Program Studi atau Perguruan Tinggi mendapatkan nilai akreditasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selain melakukan control, auditor internal juga menjadi penjembaran dalam perbaikan-perbaikan mutu internal sebelum diadakan audit eksternal.

Kajian literatur sebelumnya yang terkait dengan implementasi kebijakan SPMI seperti yang telah lakukan oleh Muh. Fitrah (Fitrah, Muh. dkk, 2018) yang melihat Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi berpendapat bahwa kepuasan *stakeholders* internal merupakan salah satu indikator keberhasilan mutu perguruan tinggi. Penerapan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan

yang sesuai dengan apa yang diharapkan *stakeholder*. Proses SPMI tidak terlepas dari kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan, serta seluruh dokumen mutu yang harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga agar diimplementasikan secara optimal.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sulaiman dan Udik Budi Wibowo (Sulaiman dan Wibowo. 2016) yang membahas mengenai Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Pada penelitian ini mereka berpendapat bahwa Implementasi SPMI di UGM dilaksanakan dengan penyusunan rancangan SPMI yang secara operasional disebut Siklus SPMI yang dilaksanakan mengikuti periode satu tahunan. Siklus SPMI terdiri atas tujuh langkah atau tahap, yaitu: penetapan standar, pelaksanaan, monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, rumusan koreksi, dan peningkatan mutu untuk kepuasan stakehorders.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi SPMI di UGM adalah: komitmen pimpinan relatif kurang, jumlah tenaga auditor yang masih terbatas, kegiatan SPMI sering terjebak menjadi

kegiatan rutin. Langkah yang ditempuh menghadapi kendala: menyediakan tenaga yang expert di bidang penjaminan mutu, memprogramkan pelatihan auditor baru dan refreshing auditor lama dilaksanakan intensif, membangun semangat baik pimpinan universitas, fakultas, jurusan, dan program studi. Evaluasi Implementasi SPMI di UGM dilaksanakan setiap tahun, dengan meminta masukan dari para auditor, dari pimpinan fakultas dan prodi yang diaudit, dan pimpinan universitas

Selanjutnya penelitian oleh Dr. I Wayan Suardana (Suardana, I Wayan. 2018) yang membahas mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Problematikanya pada Perguruan Tinggi, dalam penelitian tersebut dia berpendapat bahwa prinsip utama dalam mewujudkan budaya mutu dengan yaitu dengan menjalankan mekanisme PPEPP. Pengembangan penjaminan mutu disadari merupakan perubahan budaya kerja, sehingga pencapaian tujuan perubahan memerlukan waktu yang panjang, dan komitmen dan sumberdaya yang besar.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tanjungpura ini mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang

mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu pada Pendidikan tinggi yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Universitas Tanjungpura menetapkan SPMI Universitas Tanjungpura dengan SK Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 1893/UN22/PM/2017 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tanjungpura.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura. Kajian penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam membangun budaya mutu pada Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura di tahun 2020.

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah penyampaian informasi terkait dengan sosialisasi standar yang ditetapkan masih belum tersampaikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan, masih

terdapatnya auditor yang mengaudit lebih dari satu program.

Kajian penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam membangun budaya mutu pada Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura di tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura serta untuk mendapatkan gambaran tentang peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) program studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memotret dan mendeskripsikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada level Program Studi, dalam proses penetapan standar dikti, pelaksanaan standar dikti, evaluasi standar dikti, pengendalian standar dikti dan peningkatan standar dikti. Implikasi dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal mendorong penguatan tatakelola pada program studi secara berkelanjutan.

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta kemampuan berfikir peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik serta memberikan informasi mengenai proses implementasi kebijakan SPMI di Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura dan dapat menjadikan rujukan dalam pengembangan bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi.

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura khususnya pada Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura dalam membangun dan meningkatkan budaya mutu di Program Studi dan Perguruan Tinggi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sering juga disebut sebagai pendekatan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan metode

studi kasus dan teknik pengumpulan data: observasi langsung, wawancara serta penelusuran dokumen dan arsip.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik wawancara semi terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat dan ide-idenya. Pada penelitian ini, peneliti perlu mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang permasalahan peneliti dan mendengarkan secara teliti lalu mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Instrumen penelitian oleh peneliti sendiri sebagai orang yang melakukan penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan dan ditetapkan untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti dalam mencari data Implementasi SPMI Program Studi Magister Manajemen Universitas Tanjungpura.

Untuk keabsahan data melalui triangulasi, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti akan menggunakan satu

teknik pengumpulan data dalam hal ini wawancara pada bermacam-macam sumber data, untuk melihat bagaimana masing-masing pandangan sumber data terhadap objek yang akan diteliti oleh peneliti.

Subjek Penelitian (*informan*) dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sengaja (*purposive*), teknik ini merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan dari data penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Menurut Irawan (2009:23) maksud dari teknik *purposive* ini adalah informan yang sengaja dipilih oleh peneliti karena memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data peneliti.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura dalam meningkatkan budaya mutu dengan menerapkan standar-standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta mensosialisasikan dan melaksanakannya sesuai dengan siklus PPEPP.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura yang dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi, verifikasi dan interpretasi data kemudian dianalisis sampai pada pembahasan hingga diperoleh kesimpulan atas jawaban informan berdasarkan panduan wawancara.

Data primer yang menjadi prioritas dalam analisis kualitatif penelitian ini selanjutnya diperkuat dengan data skunder atau data literatur lainnya. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan tersebut selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan jenis dan kelompoknya. Data-data tersebut lalu diolah dan pada tahap akhir akan dianalisis dengan memberikan deskripsi dan penafsiran data dalam bentuk narasi.

C. Pembahasan

Implementasi sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi bertujuan dalam pengendalian tatakelola perguruan tinggi yang dilakukan sendiri oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan visi melalui misi

perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu hasil pendidikan.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada satuan perguruan tinggi dilaksanakan melalui tahapan proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi yang melibatkan para pihak yang berkepentingan terhadap mutu hasil pendidikan, dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, dan berdampak pada keuasan *stakeholders* (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, dunia kerja, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Tanjungpura telah menyusun dokumen standar mutu dikti yang berisi konsep SPMI dan kebijakan SPMI, standar mutu utama dan manual mutu SPMI pada tanggal 5 Februari 2018 dan telah ditanda sahkan oleh Senat Universitas. Sedangkan untuk di FEB Universitas Tanjungpura melalui Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (PMF) juga telah menyusun dokumen standar mutu dikti dan telah disahkan oleh Senat Fakultas pada tanggal 10 Februari 2020.

Dalam penelitian ini objek yang

diteliti yaitu faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk menganalisis apakah implementasi tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Goerge C. Edward III yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang dapat menyebabkan suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi, maka dari itu penulis menggunakan keempat faktor tersebut untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Membangun Budaya Mutu di Universitas Tanjungpura dengan Studi Kasus: Prodi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dalam skripsi ini disajikan secara runtut sebagai berikut:

- **Faktor Komunikasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan SPMI di Prodi Magister Manajemen UNTAN**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan memahami apa yang harus dilaksanakan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. Terdapat tiga

indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Penyampaian informasi terkait dengan kebijakan SPMI kepada seluruh fakultas dengan mengadakan pertemuan langsung dengan jajaran yang ada di fakultas, sedangkan untuk penyampaian kepada dosen dan tenaga kependidikan hanya sebagian yang diundang dalam sosialisasi tersebut. Oleh karena itu pemahaman tenaga kependidikan dan dosen terkait dengan kebijakan SPMI ini masih kurang, sebagian hanya mengetahui dari penjaminan mutu yang berkaitan dengan akreditasi tetapi tidak memahami siklus dan pelaksanaan dari SPMI tersebut. Komunikasi antar pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik mulai dari tingkat universitas sampai kepada Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura. Sosialisasi hanya dilakukan dengan pertemuan antar jajaran fakultas seperti ketua jurusan, ketua program studi dan pejabat administrasi sedangkan untuk sosialisasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan memang masih belum diadakan.

Berikut ini adalah Perbandingan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura, FEB dan Program Studi Magister Manajemen FEB UNTAN:

No	Standar Universitas Tanjungpura	Standar FEB Universitas Tanjungpura	Standar Prodi Magister Manajemen
1	<p>Standar Pendidikan:</p> <p>a. Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>b. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>c. Standar Proses Pembelajaran</p> <p>d. Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>g. Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>h. Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Standar Pendidikan:</p> <p>a. Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>b. Standar Isi Pendidikan</p> <p>c. Standar Proses</p> <p>d. Standar Penilaian</p> <p>e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>f. Standar Pengelolaan</p> <p>g. Standar Pembiayaan</p>	-
2	<p>Standar Penelitian:</p> <p>a. Standar Hasil</p> <p>b. Standar Isi</p> <p>c. Standar Proses</p> <p>d. Standar Penilaian</p> <p>e. Standar Peneliti</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>g. Standar Pengelolaan</p> <p>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p>	<p>Standar Penelitian:</p> <p>a. Standar Hasil</p> <p>b. Standar Isi</p> <p>c. Standar Proses</p> <p>d. Standar Penilaian</p> <p>e. Standar Peneliti</p> <p>f. Standar Pengelolaan</p> <p>g. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p>	-
3	<p>Standar PKM:</p> <p>a. Standar Hasil</p> <p>b. Standar Isi</p> <p>c. Standar Proses</p> <p>d. Standar Penilaian</p> <p>e. Standar Pelaksanaan</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>g. Standar Pengelolaan</p> <p>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p>	<p>Standar PKM:</p> <p>a. Standar Hasil</p> <p>b. Standar Isi</p> <p>c. Standar Proses</p> <p>d. Standar Penilaian</p> <p>e. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>f. Standar Pengelolaan</p> <p>g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p>	-

4	Standar Mahasiswa	Standar Mahasiswa	-
5	Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan	-

Sumber: LPPPM UNTAN 2021

Gambar 2.
Standar Pendidikan Tinggi UNTAN, FEB
UNTAN dan Prodi Magister Manajemen FEB
UNTAN

Universitas Tanjungpura telah menetapkan 5 standar pendidikan tinggi yang mana seluruh standar tersebut telah disosialisasikan pada setiap fakultas yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura. Sosialisasi standar yang dilakukan pada setiap fakultas ini bertujuan agar dalam mengimplementasikan dapat sejalan antara universitas dengan fakultas.

Untuk di FEB Universitas Tanjungpura juga memiliki 5 Standar Pendidikan Tinggi yang disusun berdasarkan turunan dari 5 Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura, sedangkan Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura tidak memiliki standar turunan dan tetap merujuk pada standar

yang ditetapkan oleh FEB Universitas Tanjungpura.

Kejelasan dalam memahami kebijakan SPMI ini untuk kalangan pelaksana kebijakan sebagian besar sudah memahami dengan jelas terkait apa yang ada didalam kebijakan tersebut. Namun untuk kejelasan informasi yang diperoleh dosen dan tenaga kependidikan tidak bisa dipungkiri memang masih ada yang belum paham dengan jelas terkait dengan kebijakan SPMI ini. Penyampaian informasi dengan jelas termasuk dalam salah satu faktor keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan, kurangnya kejelasan dalam penyamaan informasi terkait dengan kebijakan SPMI ini menyebabkan tidak maksimalnya kebijakan tersebut diimplementasikan.

• Faktor Sumber Daya dalam Mengimplementasikan Kebijakan SPMI di Program Studi Magister Manajemen FEB UNTAN

Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan suatu program merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan. Implementasi SPMI secara internal dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan

dalam tahap perencanaan.

Temuan-temuan dalam SPMI akan dijadikan masukan untuk memperbaiki standar dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pemanfaatan hasil implementasi SPMI selain digunakan dalam perencanaan pendidikan, juga digunakan untuk menumbuhkan semangat bekerja lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun budaya mutu, sehingga akan terwujud perbaikan yang terus menerus.

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI, kompetensi dan jumlah SDM harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI ini, jumlah auditor sebanyak 88 orang yang ada di Universitas Tanjungpura masih belum maksimal untuk mengaudit sebanyak 97 program studi yang ada karena pada saat pelaksanaan audit mutu internal di Universitas Tanjungpura idealnya terdiri dari 2 orang yaitu ketua dan 1 orang anggota. Sedangkan di FEB Universitas Tanjungpura, jumlah auditor yang tersedia hanya 6 orang auditor yang jika dibandingkan dengan jumlah

program studi yang ada di FEB Universitas Tanjungpura sebanyak 9 program studi tentunya masih sangat kurang dalam mencapai perbandingan jumlah yang ideal.

Berikut ini adalah perbandingan jumlah program studi dan auditor mutu internal dari tingkat universitas sampai ke tingkat program studi:

UNTAN		FEB	
Prodi	Auditor	Prodi	Auditor
97	88	S1 Ekonomi Pembangunan	1
		S1 Manajemen	1
		S1 Akuntansi	2
		S1 Ekonomi Islam	-
		S2 Manajemen	-
		S2 Ilmu Ekonomi	-
		S2 Akuntansi	-
		S3 Manajemen	2
		S3 Ilmu Ekonomi	-

Sumber: LPPPM UNTAN 2021

Gambar 3.
Perbandingan Jumlah Program Studi dan Auditor Mutu Internal UNTAN

Berdasarkan perbandingan jumlah program studi dan auditor mutu internal baik ditingkat Universitas Tanjungpura maupun di Program Studi Magister Manajemen terlihat perbandingan yang belum ideal yang mana pada program studi Magister Manajemen masih belum tersedia auditor mutu internal untuk mewakili dalam mengaudit seluruh program studi di Universitas Tanjungpura.

- **Faktor Disposisi dalam Mengimplementasikan Kebijakan SPMI di Program Studi Magister Manajemen FEB UNTAN**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting terhadap implementasi kebijakan yang efektif. Menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino 2014:150) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut dapat berupa komitmen dan kejujuran para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya jika sikap atau perspektif yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan pembuat kebijakan maka proses implementasi tidak dapat terlaksana dengan efektif.

Mengenai disposisi atau sikap para pelaksana, seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa implementasi yang berjalan kurang maksimal akan menimbulkan berbagai hal lain seperti

kurangnya komitmen pimpinan dalam membangun budaya mutu khususnya di program studi sehingga kurang dapat menunjukkan komitmen bagi pengembangan mutu program studi.

Melihat perbandingan antara program studi dan jumlah auditor diatas, komitmen pimpinan untuk meningkatkan jumlah auditor mutu internal pada program studi Magister Manajemen sangat diperlukan agar dapat ikut secara aktif dalam kegiatan Audit Mutu Internal yang mana tidak hanya diaudit oleh program studi lain saja melainkan program studi manajemen juga dapat mengaudit sehingga terjadi timbal balik yang efektif dalam mengembangkan mutu di masing-masing program studi.

- **Faktor Struktur Birokrasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan SPMI di Program Studi Magister Manajemen FEB UNTAN**

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SPMI dalam membangun budaya mutu di Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura adalah struktur birokrasi.

Penjaminan Mutu Fakultas dapat

dikatakan sebagai motor penggerak dan koordinator dalam melakukan peran serta sebagai pengendali mutu, pengembang sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat fakultas yang terhubung dengan sistem penjaminan mutu universitas secara menyeluruh.

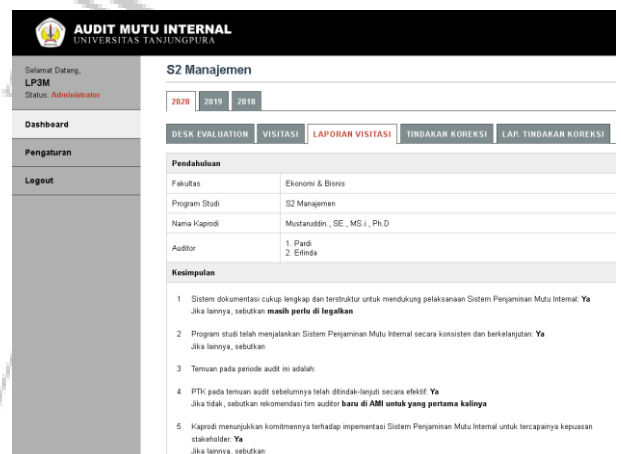
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SPMI dalam membangun budaya mutu di Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura adalah pola hubungan kerjasama antara Program Studi, Fakultas dan Perguruan Tinggi dengan adanya niat saling melengkapi dan mendukung untuk membangun budaya mutu.

Untuk ditingkat program studi menjadi tempat akhir dimana pengembangan dan pemenerapan kebijakan dari dokumen-dokumen mutu ditingkat fakultas dan universitas sehingga pada saat pelaksanaan AMI semua bentuk temuan akan terlihat di program studi.

Untuk ditingkat program studi menjadi tempat akhir dimana pengembangan dan pemenerapan kebijakan dari dokumen-dokumen mutu ditingkat fakultas dan universitas

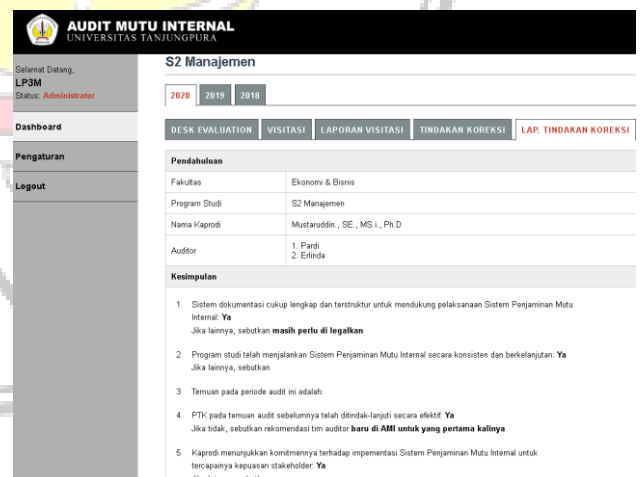
sehingga pada saat pelaksanaan AMI semua bentuk temuan akan terlihat di program studi.

Berikut ini adalah hasil audit mutu internal pada Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura tahun 2020 secara daring:



Sumber: LPPPM UNTAN 2021

Gambar 4.
Laporan Visitasi AMI Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura Tahun 2020



Sumber: LPPPM UNTAN 2021

Gambar 5.
Laporan Tindakan Koreksi AMI Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura Tahun 2020

Temuan hasil audit mutu internal Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura pada tahun 2020 bahwa masih adanya hasil temuan AMI yang belum ditindak lanjuti dan menjadi temuan saat diaudit berikutnya. Peningkatan mutu berkelanjutan dapat ditunjukkan dengan adanya tindakan tindak lanjut terhadap hasil AMI, seperti dengan melengkapi dokumen-dokumen mutu yang digunakan untuk meningkatkan mutu. Hasil temuannya berupa ketersediaan dan kesahihan bukti pendukung saat AMI dan belum adanya informasi detail mengenai monitoring dan evaluasi terhadap beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

D. Simpulan

- **Kesimpulan**

Sosialisasi kebijakan SPMI yang dilaksanakan pada tingkat universitas yang diselenggarakan oleh PPM LPPPM UNTAN telah mengundang dan melibatkan semua personil penjaminan mutu baik fakultas maupun program studi. Sedangkan pada tingkat program studi khususnya pada Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura, sosialisasi masih sebatas jajaran anggota

penjaminan mutu program studi dan penelolah saja, sedangkan dosen serta staf tidak dilibatkan dalam sosialisasi tersebut.

Jumlah auditor AMI baik ditingkat universitas maupun ditingkat fakultas dan program studi masih belum maksimal. Perbandingan Auditor AMI dengan jumlah program studi khususnya di FEB masih belum maksimal.

Peningkatan mutu berkelanjutan dapat ditunjukkan dengan adanya tindakan tindak lanjut terhadap hasil AMI, seperti dengan melengkapi dokumen-dokumen mutu yang digunakan untuk meningkatkan mutu.

- **Saran**

1. Diharapkan kepada Program Studi Magister Manajemen FEB dapat mensosialisasikan kebijakan SPMI secara internal tidak hanya sebatas sosialisasi yang dilaksanakan dari fakultas dan hanya melibatkan jajaran fakultas, program studi dan penelolah saja, akan tetapi Program Studi Magister Manajemen FEB juga harus mensosialisasikan serta

melibatkan seluruh dosen dan tenaga kependidikan/staf dalam sosialisasi tersebut agar pemahaman dan pengetahuan mengenai kebijakan SPMI dapat terlaksana dengan baik.

2. Diharapkan penambahan jumlah auditor terus dilakukan agar dalam pelaksanaan audit mutu internal nanti jumlah auditor dengan program studi yang akan diaudit seimbang.
3. Adanya tindakan tindak lanjut terhadap hasil AMI dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cv. Alfabeta. Bandung.
- Fitrah, Muh. Dkk. 2018. *Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi*. Jurnal Penjaminan Mutu. Volume 4 Nomor 1. Februari 2018
- Irawan, N. (2009). *Strategi Pemasaran dengan analisis SWOT di Perusahaan CV. Langit Aksara Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: UNY
- Pratama, Muchti Yuda. 2018. *Penerapan SPMI di Akper Kesdam I/Bukit Barisan Medan*. Klinik SPMI. Medan
- Suardana, I Wayan. 2018. *Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Problematikanya Pada Perguruan Tinggi*. Penjaminan Mutu Universitas Udayana, Denpasar-Bali.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulaiman, Ahmad dan Wibowo U B. 2016. *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No 1, April 2016 (17-32)
- Trianto, Deni. 2020. *Evaluasi Siklus Pelaksanaan Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STT Bethel Indonesia*. Jurnal Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Volume 6 Nomor 2 tahun 2020.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Intisari Statistik Pendidikan Tinggi 2020.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Surat Keputusan Rektor Universitas
Tanjungpura
Nomor:1893/UN22/PM/2017
Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Internal Universitas Tanjungpura

